

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai Pelayanan Pemerintah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dimana dalam melaksanakannya memerlukan dana yang cukup besar untuk itu Pemerintah Daerah berupaya dalam meningkatkan sumber – sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah. Sumber – sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana Perimbangan Keuangan; dan
3. Pinjaman Daerah.

Diantara ketiga sumber diatas yang menjadi tumpuan utama dari sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola hasil daerah sendiri.

Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah; dan
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang besar.

Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi tentang wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan

peraturan daerah (perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.

Unsur – Unsur yang terdapat dalam definisi pajak daerah, yaitu:

1. Pajak daerah merupakan iuran wajib dari orang sebagai individu atau badan kepada daerah.
2. Pajak daerah dipungut tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang atau tanpa adanya kontra prestasi individual.
3. Pajak dipungut berdasarkan peraturan undang – undangan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya, yaitu peraturan daerah.
4. Hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk menutup pengeluaran daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;

- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan.

Salah satu hasil pajak daerah Pemerintah daerah diatas Pajak kabupaten/ kota yang termasuk dalam Pajak Daerah yang cukup besar kontribusinya dalam memenuhi Sumber – Sumber Pendanaan Pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang **”EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAN KOTA CILEGON”**. Tugas akhir ini disusun penulis berdasarkan hasil kerja praktek dibagian seksi akuntansi.

### **Ruang Lingkup Penulisan**

Bagaimana Pemungutan Pajak Air Tanah berdasarkan peraturan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon?

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1.2.1 Tujuan Penulisan**

1. Menambah pengetahuan lebih dalam lagi tentang evaluasi pendapatan asli daerah atas pemungutan pajak air tanah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Melatih kemampuan dalam memahami pajak air tanah.
3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak air tanah.

### **1.2.2 Kegunaan Penulisan**

#### **1.2.2.1 Bagi Penulis**

1. Membandingkan teori yang didapatkan di kampus dengan kenyataan yang ada dalam hal ini.
2. Menambah wawasan dan pengalaman kerja yang akan kita hadapi dimasa yang akan datang.

3. Sebagai syarat untuk mencapai gelar ahli madya sekaligus menyelesaikan pendidikan di Universitas Diponegoro Semarang.

#### **1.2.2.2 Bagi Universitas Diponegoro Semarang**

1. Melihat sejauh mana penulis dapat menerapkan teori yang sudah di dapat dalam bangku kuliah.
2. Menjalani hubungan kerja sama antara pihak kampus dan pihak dinas.

#### **1.2.2.3 Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara organisasi tempat Kuliah Kerja Praktek (KKP).

### **1.3 Cara Pengumpulan Data**

#### **1.3.1 Data Penulisan**

Data penulisan yang digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini diperoleh langsung ketika melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Praktek (KKP) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon.

Menurut Kountur (2008) Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya. Data primer didapat langsung tanpa menutup – nutupi atau mengganti jalan pemikirannya, diceritakan sesuai dengan apa yang didapat atau dilihat sendiri sesuai dengan keadaan senyatanya/murni. Dalam hal ini cara penulisan diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon.

Sedangkan data sekunder menurut Kountur (2008) adalah cara yang bersumber dari laporan yang dibuat pihak lain. Hasil laporan yang telah dibuat pihak lain tersebut masih dipergunakan untuk suatu penelitian yang lain.

### **1.3.2 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi yang relevan sebagai dasar penyusunan Laporan Tugas Akhir, metode pengumpulan data yang dipakai oleh penulis untuk mengumpulkan data penulisan yaitu melalui wawancara dan observasi selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Praktek di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon.

Menurut Kountur (2008) wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban yang langsung diberikan oleh responden. Peneliti merupakan pewawancara dan responden adalah orang yang diwawancarai. Sedangkan observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan apabila peneliti ingin mengamati perilaku konsumen sebagai obyek yang diteliti.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan sehingga pembaca diharapkan dapat mengetahui garis besar masalah yang dikemukakan dalam penulisan dan pembahasan laporan ini.

### **Bab II Profil Perusahaan**

Bab ini menjelaskan tentang Profil Perusahaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon, yang meliputi sejarah singkat, gambaran umum, visi dan misi, tujuan dan sasaran.

### **Bab III Pembahasan**

Bab ini akan menguraikan tentang masalah yang akan dibahas, yaitu : “Bagaimana Pemungutan Pajak Air Tanah berdasarkan peraturan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang telah ditulis dalam pembahasan.